

PANDANGAN JAMAAH TABLIGH DAN SALAFI TERHADAP KHILOFAH, DEMOKRASI DAN MONARKI (SATU TINJAUAN JAMBI)

Haris Mubarak

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
E-mail: haris_mubarak@yahoo.co.id

Abdul Razak

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
E-mail: Tun_razak80@yahoo.com

Naskah diterima tanggal 27 Agustus 2015. Revisi pertama tanggal 18 September 2015, revisi kedua 10 Oktober 2015, dan revisi ketiga 18 November 2015.

Abstract: This article aims to identify Tablighi Jama'at's and Salafi's views about politics both khilafah, democracy and monarchy. With using qualitative approach, this research obtains that there is same opinion between Tablighi Jama'at and Salafi about khilafah, but they have different view about democracy and monarchy. Tablighi Jama'at and Salafi are two Islamic movements claiming themselves as followers of Sunnah of the Prophet, the Companions, tabi'in and tabi' tabi'in. But in the practice, Tablighi Jama'at and Salafi have different view in various aspects, one of them is about politics. They explain that khilafah is a boon to human from Allah and this is difficult to be done at now. To establish this system, it has to begin from below (from ourselves, family and neighbor and so on). In the democracy and monarchy system, Tablighi Jama'at is able to accept those political systems for the reason that it can break the Moslem unity. However Salafi refuses democracy system, because this system is not from Islam and it has a lot of weakness, even though in this system, there are many Islamic political parties. In the monarchy system, Salafi can accept it, because the Companions had ever practiced it.

Keywords: Tablighi Jama'at, Salafi, khilafah, democracy and monarchy.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Jamaah Tabligh dan Salafi terhadap sistem politik baik itu sistem politik Islam (khilafah), demokrasi maupun monarki. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melihat bahwa ada persamaan pandangan mengenai sistem khilafah antara Jamaah Tabligh dan Salafi, namun berbeda pandangan mengenai sistem politik demokrasi dan monarki. Jamaah Tabligh dan Salafi adalah dua gerakan dakwah yang menyatakan diri mereka adalah pengikut Sunnah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Namun dari segi praktiknya, keduanya

mempunyai pandangan berbeda, salah satunya dari aspek politik. Menurut keduanya, terbentuknya khilafah adalah anugerah dari Allah SWT dan ini sulit untuk terlaksana saat ini, untuk membangunnya harus dimulai dari bawah khususnya dari diri sendiri, keluarga dan seterusnya. Sedangkan dalam memandang demokrasi dan monarki, Jamaah Tabligh menerima setiap sistem politik, karena Jamaah Tabligh memang menghindari pembicaraan mengenai sistem politik tersebut, karena dianggap dapat menimbulkan perpecahan. Namun berbeda dengan Salafi yang menolak sistem demokrasi walaupun dalam sistem tersebut ada partai politik Islam, karena demokrasi bukan lahir dari Islam dan memiliki banyak kelemahan, tetapi Salafi tidak menolak sistem monarki karena sistem tersebut pernah dipraktikkan pada masa sahabat.

Kata Kunci: Jamaah Tabligh, Salafi, khilafah, demokrasi dan monarki.

Pendahuluan

Demokrasi telah menjadi salah satu pilihan terbaik bagi negara-negara di dunia untuk mencapai cita-cita negara, sehingga banyak negara yang melakukan perubahan politik dari negara yang tidak demokrasi menjadi negara yang demokrasi. Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan perubahan politik tersebut dari negara otoriter menjadi negara demokrasi pada tahun 1997/1998. Perubahan politik tersebut diharapkan memberikan dampak positif di berbagai bidang kehidupan.

Keberadaan sistem demokrasi yang memberikan kebebasan di berbagai bidang telah memberikan kesempatan kepada individu, kelompok dan bahkan aliran dalam keagamaan untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini tentunya berbeda dengan era sebelumnya, di mana kebebasan individu dibatasi, apalagi kebebasan kelompok atau aliran yang tidak sejalan dengan kepentingan kelompok yang berkuasa dianggap sebagai sebuah ancaman kepada negara. Pada saat ini, berbagai kelompok atau aliran keagamaan berkembang dengan pesat baik itu berasal dari dalam negeri sendiri maupun kelompok-kelompok yang datang dari luar.

Salafi dan Jamaah Tabligh adalah diantara gerakan Islam yang saat ini berkembang di Indonesia khususnya ketika terjadinya per-

alihan kekuasaan dari Soeharto ke era Reformasi. Walaupun keberadaan dua gerakan ini pada dasarnya telah ada sebelum perubahan politik, namun perkembangan mereka tidaklah sepesat saat ini. Ini karena demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia memberikan ruang yang lebih besar kepada berbagai kelompok, organisasi dan aliran untuk berkembang, memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan pilihannya, dan memberikan kebebasan untuk menganut agama yang dipercayai dan adanya jaminan kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan pemeluknya (UUD 45 pasal 28 dan 29). Namun yang menjadi catatan, Jamaah Tabligh dan Salafi bukanlah gerakan Islam yang murni terlahir dari rahim Indonesia. Keduanya adalah gerakan Islam yang berasal dari luar dan kemudian tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Salafi dan Jamaah Tabligh bukan saja memiliki persamaan karena berasal dari luar, tetapi juga pengakuan mereka bahwa mereka mengikuti ajaran Rasulullah dan kemudian dipraktikkan oleh orang-orang setelah nabi yaitu sahabat, *tabi'in* dan *tabi' tabiin*.¹ Mer-

1 Sahabat merujuk kepada orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW yang kemudian membantu Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Sedangkan *Tabi'* dan *Tabi' tabiin* adalah orang-orang setelah sahabat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat menjaga perilaku

eka juga sama-sama sangat menjaga cara berpakaian mereka, menjaga kehidupan masjid, berdakwah, mengadakan majlis-majlis keilmuan dan sebagainya. Walaupun dari segi aktivitas terlihat ada persamaan, tetapi mereka juga memiliki perbedaan sangat kental sekali. Perbedaan tersebut dalam dilihat dari berbagai aspek pemahaman terutama sekali dalam menyampaikan dakwah.² Hal lain yang

dan keimanan mereka sebagaimana yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW.

- 2 Strategi dakwah Salafi dilakukan dengan cara pendidikan dan pemurnian ajaran agama. Untuk melakukan kegiatan dakwah ini, Salafi menggunakan metode *halaqah* (pemberian materi oleh seorang ustadz berdasarkan kepada buku-buku dan murid menyimak materi yang disampaikan) dan *daurah* (pengajian yang dilakukan pada waktu tertentu). Kemudian mendirikan yayasan termasuklah yang bergerak dalam bidang pendidikan seperti pesantren, melalui siaran radion dan televise, penerbitan dan sebagainya (Lihat Muhammad Ali C, "Strategi Dakwah Salafi di Indonesia", *Jurnal Dakwah*, 2013, Vol. XIV(1): 1-25. Sementara itu, Jamaah Tabligh juga melakukan kegiatan difokuskan pada sistem *khuruj*, yaitu keluar dalam waktu tertentu seperti selama 3 hari, 40 hari, 4 bulan dan dalam waktu tertentu dilakukan selama satu tahun. Untuk meningkatkan dakwah tadi, metode yang dilakukan adalah *jaulah* (mengunjungi masyarakat sekitar ketika *khuruj*), *bayan* (memberikan pemahaman kepada para jamaah tentang nilai-nilai perjuangan yang dibawah oleh Nabi dan pengorbanan mereka termasuklah para sahabat), *ta'lim* (membaca kitab baik itu hadits, pemahaman agama dan sebagainya yang dilakukan setelah sholat fardhu) dan penerbitan (Lihat Haris Mahdi, "Interaksi Sosial Jamaah Tabligh di Kota Malang: Studi Tentang Interaksi Sosial Jamaah Tabligh di Masjid Pelma dan Ponpes Jami'urrahma Malang, *El-QUDWAH*, 2012 atau dapat dilihat di <http://www.moraref.or.id/record/view/26594>). Perbedaan yang mendasar antara keduanya adalah persoalan *khuruj*, di mana *khuruj* dianggap oleh Salafi sebagai sebuah aktifitas dakwah yang tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi dan sahabat, sedangkan Jamaah Tabligh berpendapat bahwa para sahabat berdakwah

akan ditinjau dari keduanya adalah dalam aspek politik, apakah ada perbedaan pandangan antara keduanya ketika memandang sistem pemerintahan Islam (khilafah),³ demokrasi dan monarki? persoalan ini penting mengingat bahwa sistem politik di zaman Rasulullah SAW tidaklah sama dengan sistem politik yang dianut saat ini, demokrasi pada masa sekarang menjadi pilihan bagi kebanyakan negara di dunia termasuklah di negara-negara yang mayoritasnya adalah muslim dan Indonesia adalah salah satu yang menjadikan sistem demokrasi sebagai sistem politiknya.

Menjawab persoalan di atas, beberapa sarjana telah mengkaji persoalan tersebut dalam ruang lingkup yang tidak jauh berbeda, dari aspek perbedaan, misalnya penelitian Roswati (2015), walaupun tidak meninjau secara pemahaman politik, namun penelitian beliau mencoba memahami perbedaan pandangan antara Salafi dan Jamaah tabligh dari aspek peringatan Maulid Nabi, keduanya sama-sama tidak menyetujui adanya acara tersebut, tetapi Salafi dengan tegas menolak karena bid'ah. Sedangkan Jamaah Tabligh tidak secara tegas

tidak pernah berdiam di satu tempat, tetapi mereka menyebarkan agama ke tempat-tempat lainnya dan bahkan mengorbankan harta, jiwa dan keluarga sekalipun demi tegaknya agama Islam. Namun perbedaan pandangan antara keduanya mengenai hal lain yang bertentangan tidak dijelaskan dalam tulisan ini

- 3 Sistem khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang pernah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat setelah beliau wafat. Sistem pemerintahan khilafah ini mengatur segala sendi kehidupan manusia baik itu sosial, ekonomi, politik maupun hukum. Tujuannya adalah untuk menegakkan syariat Islam dan menjaga kepentingan umat Islam. Sistem pemerintahan ini bersifat global dan tidak berbentuk seperti negara modern saat ini seperti sistem Kesatuan, Federal maupun konfederasi. Namun pemimpin yang disebut sebagai khilafah akan mengayomi seluruh umat Islam di dunia.

melarang dan cenderung membolehkan dengan catatan tidak keluar dari nilai-nilai Islam.⁴ Dari aspek pandangan terhadap demokrasi, Din Wahid (2014b) menjelaskan bahwa gerakan Salafi menolak sistem demokrasi, namun mereka tetap mendukung pemerintahan yang terlahir dari proses demokrasi tersebut dan tidak akan menentang pemerintahan yang ada.⁵ Begitu juga dengan Arif (2014) yang menyatakan Salafi menentang demokrasi dan menurutnya jalan terbaik tersebut adalah melalui sistem *Shalaf as- Shalih*.⁶ Selain itu, Abdul R dan Elis P (2011) melihat dalam aspek toleransi. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa Salafi tidak memiliki toleransi terhadap organisasi lainnya terlebih lagi jika itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam dalam pandangan mereka.

Pandangan para sarjana di atas menunjukkan bahwa sistem politik yang tidak Islami merupakan sistem politik yang tidak dapat diterima oleh umat Islam dalam perspektif Salafi, sedangkan Jamaah Tabligh secara tidak tegas untuk mengatakannya sebagaimana hasil penelitian Roswati (2015). Berdasarkan kajian terdahulu pula, tulisan ini mencoba untuk mendiskusikan pembahasan yang telah dibahasakan oleh para sarjana dalam konteks pemahaman terhadap sistem politik.

4 Roswati Nurdin, "Perspektif Salafi dan Jamaah Tabligh terhadap Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW (Studi Kasus di Desa Batu Merah Ambon)", *Jurnal Fikratuna*, 2015, Vol.7(1): 198-211.

5 Din Wahid, "The Challenge of Democracy in Indonesia: The Case Salafi Movement", *Islamika Indonesianna*, 2014b, Vol 1(1): 59-74.

6 Model ini dapat melalui penunjukkan ataupun keturunannya, lihat Arif Rahmanul Hakim, "Pandangan Salafi Raudhlatul Amin Desa Ketapang Jaya Terhadap Pemilihan Umum di Kabupaten Sampang", *Jurnal Review Politik*, 2014 Vol.04(1): 1-29.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk pendekatan studi kasus. Pendekatan ini tidaklah untuk generalisasi terhadap semua pandangan Jamaah Tabligh dan Salafi secara umum, tetapi ini dapat digunakan untuk kepentingan kajian lainnya yang tidak jauh berbeda atau dalam penelitian kualitatif disebut dengan *transferability*.⁷

Sumber data penelitian ini berasal dari wawancara, di mana penentuan wawancara dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan alasan mereka yang diwawancarai adalah orang yang terlibat langsung dalam aktivitas tersebut dan memiliki pengaruh dikomunitasnya seperti peringkat maulana dan ustadz.

Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (1991) yaitu mereduksi data. Data yang akan direduksi ini berasal dari hasil wawancara dengan para informan, kemudian data ini akan dipilah dan diberikan kode tertentu untuk menunjukkan kesesuaian dan perbedaan dalam pandangan informan dan selanjutnya data ini akan diverifikasi atau disimpulkan. Data-data ini juga akan dilihat kesesuaiannya dengan data-data sekunder, sehingga interpretasinya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sekilas Mengenai Salafi dan Jamaah Tabligh

Di Indonesia, penggunaan kata salafi seringkali disamakan dengan kata salafiyah. Tetapi makna dan perkembangan dari segi praktiknya sangat jauh berbeda dan sangat bertentangan. Kata salaf sendiri dalam bahasa Arab me-

7 Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 13

miliki berbagai macam arti seperti pinjaman dan pembayaran, ada juga diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas yang dibawa oleh seseorang dan sebagainya.⁸ Kemudian mereka yang bergelar salaf merujuk pada generasi ketiga terawal yang menjadi panutan umat yaitu sabahat, tabi'in dan tabi' tabiin. Mereka ini memahami ajaran agama Islam dengan lebih baik, karena mereka hidup berdekatan dengan zaman Nabi Muhammad SAW.⁹ Sedangkan kata *fi* diujung kata salafi untuk menunjukkan kalau mereka adalah orang-orang yang ikut jejak kaum salaf.¹⁰ Pengakuan ini dipertegas oleh Salafi sebagai salah satu bentuk yang membedakan gerakan mereka dengan gerakan dakwah lainnya, di mana dakwah yang mereka sampaikan mengikuti dakwah yang diajarkan dari tiga generasi tersebut, sedangkan yang lainnya telah banyak dimodifikasi sesuai dengan keperluan organisasi, golongan ataupun penyampainya.¹¹

Dengan demikian, Salafi merujuk pada

generasi tertentu, hal ini berbeda dengan makna Salafiyah, di mana kata ini merujuk pada praktik pendidikan tradisional di Indonesia khususnya pesantren-pesantren yang masih menggunakan kitab-kitab klasik atau disebut dengan kitab kuning, dan sistem pembelajarannya juga dilakukan tanpa sistem pembelajaran modern sebagaimana sekolah-sekolah umum lainnya.¹²

Salafi sendiri juga seringkali diidentikkan dengan Wahabi yang dipelopori Muhammad Ibnu Abdul Wahab.¹³ Wahabi merupakan gerakan pembaharuan Islam yang berusaha untuk memurnikan ajaran Islam dari segala macam bentuk bid'ah, khurafat ataupun budaya-budaya masyarakat yang telah masuk ke dalam ajaran agama Islam yang tidak sesuai dengan ajaran yang di bawah oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Din (2014a) menjelaskan bahwa penggunaan istilah Salafi dan Wahabi secara bersamaan tidaklah selalu identik. Orang-orang Salafi menolak jika mereka disamakan dengan Wahabi walaupun dari beberapa segi ajaran mereka adalah sama.¹⁴ Dari segi penamaan, banyak sekali nama-nama yang menunjukkan Salafi ini seperti *al Jamaah*, *ahl al Hadits*, *ahl al Atsar*, *Firqun Najiah*, *Jamaatul muslimin*, *al Itibah*, dan *al Ghuraba'*. Semua kata-kata di atas maksudnya sama dan tidak ada perbedaan dalam makna.¹⁵

8 Rusli, "Indonesian Salafism and Jihad and Suicide Bombing", *Journal of Indonesian Islam*, 2014, Vol 8(01): 93.

9 Din Wahid, *Nurturing The Salafi Manhaj: A Study Of Salafi Pesantrens In Contemporary Indonesia*, Disertasi Universitas Utrech, 2014a, hlm. 17-18

10 Wawancara dengan Ustadz Said, di yayasan al-Bukhori, Telanai Pura, Jambi tanggal 7 September 2015 pukul 13-14.30

11 Ustadz Hasbi adalah salah seorang pengurus yayasan dan menjadi staf pengajar di Pondok Pesantren di Yayasan al-Bukhori Jambi. Beliau sendiri sudah tertarik dengan gerakan salafi sejak tahun 2004 karena keyakinan beliau bahwa banyak sekali ajaran-ajaran agama Islam yang berkembang saat ini yang tidak sesuai dengan para kaum salaf yaitu generasi dari Sahabat, tabi'in dan tabi' tabiin. Beliau masuk ke salafi setelah mengikuti pengajian-pengajian yang disampaikan oleh penyebar salafi di Jambi yaitu guru Yahya (Wawancara dengan ustadz Hasbi di rumah beliau di Pematang Sulur Rt. 23 Kota Jambi, tanggal 30 Agustus 2015 pada pukul 13.45-14.35).

12 Zainal Arifin, "Kepemimpinan Kiai Dalam Ideologi Pemikiran Santri Di Pesantren-Pesantren Salafiyah Mlangi Yogyakarta" *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2015, Vol. 9(2), hlm. 354

13 Wiktorowicz, Q., "Anatomy of Salafi Movement", *Studies in Conflict & Terrorism*, 2006, hlm. 207.

14 Din Wahid, *Nurturing The Salafi Manhaj: A Study Of Salafi Pesantrens In Contemporary Indonesia*, hlm. 21.

15 Nama-nama ini dapat dilihat dalam buku Abdul Qadir Jawaz. 2008. *Buku Mulia Manhaj Salaf*. Bogor : Pustaka At-Taqwa.

Salafi tidaklah terlahir di Indonesia, tetapi merupakan fahaman dari luar yang masuk ke Indonesia khususnya dari Arab Saudi. Fahaman ini telah lama dipraktikkan oleh para ulama di Indonesia seperti dalam kasus Kaum Padri di Sumatera Barat yang dipelopori oleh ulama seperti Haji Miskin, Haji Sumanik (Muhammad Arif) dan Haji Piobang (Abdurrahman) yang berasal dari Pandai Sike', Delapan Koto (kota) dan Tanah Datar dan beberapa ulama lainnya yang berusaha memurnikan ajaran agama Islam dari pengaruh adat istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran agama seperti minum-minuman keras, judi, syirik dan sebagainya.¹⁶

Perkembangan yang semakin pesat mulai terjadi di Indonesia seiring dengan peningkatan ekonomi Arab Saudi pada tahun 1970an dan 1980an. Fahaman ini kemudian menyebar luas di Indonesia dalam berbagai bentuk salah satunya adalah melalui pendidikan, seperti berdirinya Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) yang merupakan cabang dari Universitas Imam Muhammad bin Suad Riyadh di Jakarta, kemudian berdiri pula organisasi-organisasi yang merujuk kepada fa-

haman ini.¹⁷

Fahaman Salafi sendiri lebih menekankan pada persoalan peningkatan ketauhidan melalui pemurnian ajaran Islam. Sebagaimana Ustadz Hasbi tekankan bahwa:

Tauhid adalah fondasi pertama dari kalimat *la ilaha illallah* yang ia diamalkan oleh seluruh umat muslim, tapi apabila orang tidak mengetahuinya maka percuma saja amalnya. Maka prioritas dakwah salafi adalah difokuskan pada pembenahan tauhid ini.¹⁸

Ketauhidan ini adalah untuk mengembalikan ajaran agama Islam kepada ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Salafi beranggapan bahwa dunia yang semakin berkembang saat ini sangat berpengaruh terhadap ajaran Islam, di mana ajaran agama Islam sudah tercampur aduk oleh aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan ajaran agama itu sendiri. Oleh karena itu, Salafi bergerak untuk menghapuskan masuknya ajaran-ajaran atau aktivitas yang tidak sesuai tersebut.¹⁹ Dengan demikian, inti penekanan yang diajarkan

16 Para ulama-ulama ini pada mulanya seperti ulama kebanyakan di Sumatera Barat yang masih dapat bertoleransi terhadap adat dan istiadat setempat. Tetapi keadaan ini berubah ketika mereka menginjakkan tanah suci, Mekkah. Mereka yang berkunjung ke tanah suci, kemudian akhirnya terpengaruh oleh ajaran Islam yang berkembang di sana. Hal ini juga terjadi di tanah Jawa, Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah juga mengalami perubahan pandangan sepulang dari Mekkah, di mana beliau mencoba untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang sangat kuat dipengaruhi oleh adat istiadat yang telah mereka ikuti secara turun temurun. Namun gerakan ini tidaklah menamakan diri mereka sebagai Salafi ataupun Wahabi pada masa itu, namun beberapa fahaman yang dibawa mereka tidak jauh dari usaha yang dilakukan oleh gerakan Islam Salafi ataupun Wahabi.

17 Diskusi lebih lanjut mengenai perkembangan Salafi di Indonesia dapat dilihat dalam Din Wahid, *Nurturing The Salafi Manhaj: A Study Of Salafi Pesantrens In Contemporary Indonesia*, Disertasi Universitas Utrech, 2014a; lihat juga Book Review oleh Din Wahid, "Pentas Jihad Gerakan Salafi Radikal Indonesia", *Studia Islamika*, 2007, Vol.14(02): 341-362.

18 Wawancara dengan Ustadz Hasbi, pengurus yayasan al-Bukhori dan Guru di Pondok Pesantren dan sekolah Uswatun Hasanah di Yayasan al-Bukhori, di rumah beliau di Pematang Sulur Rt. 23 Kota Jambi, tanggal 30 Agustus 2015 pada pukul 13.45-14.35

19 Bidah, khurafat dan kemusyrikan merupakan praktik yang telah banyak masuk dalam ajaran agama Islam saat ini yang dapat membawa umat lari dari ajaran semula. Dalam pandangan salafi, bid'ah itu sudah pasti menyalahi ketentuan, tidak ada yang namanya bid'ah hasanah (bid'ah yang baik) ataupun bid'ah sai'at (bid'ah yang buruk) yang saat ini banyak dinyatakan oleh umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi: *kullu bidahtin dallah*.

oleh salafi adalah mengajak umat Islam untuk kembali memahami al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan berpijak atau berlandaskan pada pemahaman para sahabat, tabiin dan tabi' tabiin.

Berbeda dengan Salafi, Jama'ah Tabligh adalah sebuah gerakan Islam yang dilakukan oleh sekelompok umat yang terfokus pada gerakan dakwah. Kelompok ini lahir dan berkembang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan tetapi melalui individu, karena sememangnya Jamaah Tabligh ini dibentuk oleh seorang tokoh agama yang bernama Maulana Muhammad Ilyas al-Kandahlawi bin Muhammad Ismail al-Kandahlawi.²⁰

Sejak kecil, Maulana Muhammad Ilyas telah mengenal pendidikan agama dan memulai menghafal al-Qur'an. Hal ini dapat dimaklumi karena ayahnya juga merupakan seorang pemuka agama yang memiliki reputasi di India.²¹ Setelah sekian lama belajar menuntut ilmu agama, Maulana Ilyas kemudian tergerak hatinya untuk berdakwah kepada masyarakat.

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Artinya: Adapun sesudahnya maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru yang diada-adakan (*muhdatsat*), dan setiap bid'ah itu kesesatan" (HR. Muslim).

20 Nama al-Kandhla yang melekat pada nama beliau adalah nama sebuah daerah yang terletak di utara Pradesh di India yang menunjukkan tempat dari mana beliau berasal dan menghabiskan masa kecilnya.

21 Selama menempuh pendidikan agama, selain belajar pada orang tuanya sendiri dan saudara-saudaranya, beliau juga telah belajar dari ulama-ulama ternama pada masa itu seperti Syekh Rasyid Ahmad Al-Gangohi, yaitu seorang pembaharu Islam, Syekh Mahmud Hasan, seorang ahli hadits, Syekh Khalil Ahmad As-Shaharunpuri, dan sebagainya.

Beliau meyakini bahwa dakwah merupakan alat penting untuk mengembangkan ajaran agama Islam yang sempurna sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul serta para sahabat sehingga ajaran agama Islam berkembang ke seluruh alam. Beliau menyadari bahwa usaha dakwah yang dilakukan para nabi dan rasul bahkan para sahabat tidaklah akan berhasil jika tidak ada pengorbanan di jalan Allah. Para nabi dan sahabat berdakwah dari satu tempat ke tempat lain, mereka berkorban demi Islam, mereka siap dihina, disakiti dan bahkan mereka berdakwah sampai menghembuskan nafas terakhir dan lebih memilih mati di jalan Allah. Oleh karena itulah, Maulana Ilyas menyakini bahwa tanggung jawab untuk menyebarkan agama Islam merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh umat Islam dan bukan hanya diletakkan pada para nabi, sahabat, tabiin atau ulama saja.²²

Di samping itu, faktor lain yang mempengaruhi beliau untuk memulai usaha dakwah tersebut adalah untuk mempertahankan orang-orang Islam di India dari gerakan-gerakan misionaris Kristen yang berasal dari Barat yang berusaha menyebarluaskan agama tersebut di tengah-tengah masyarakat Islam dan orang-orang Hindu yang menjadi rival umat Islam di sana.²³

Gerakan Maulana Ilyas tidaklah seperti organisasi-organisasi yang tumbuh dan berkembang saat itu di India, di mana dalam proses intensitas politik yang menuntut kemerdekaan dari Inggris, para Jamaah Tabligh

22 Jan A. Ali, "Tabligh Jam'at: A transnational movement of Islamic faith regeneration", *European Journal of Economic and Political Studies*, 2010, hlm. 105.

23 Farish A Noor, *Islam on the Move: the Tablighi Jama'at in Southeast Asia* (Amsterdam: Amsterdam University Pers, 2012), hlm. 28.

justeru mengambil jalan lain yaitu dengan cara berdakwah mengunjungi dari satu kawasan ke kawasan lainnya, padahal organisasi-organisasi lain seperti *the Indian Muslim League* lebih sedikit radikal untuk mempertahankan Islam dan kemerdekaan.²⁴

Ketika dimulainya usaha dakwa, Maulana Ilyas tidaklah memberi nama gerakan dakwahnya sebagai gerakan Tabligh, Jamaah Tabligh, *Jaulah* atau nama lainnya, beliau juga tidaklah mendeklarasikan gerakan dakwahnya sebagaimana organisasi-organisasi atau pergerakan dakwah lainnya dan bahkan mereka tidak memiliki struktur organisasi yang jelas. Tetapi beliau memulai usaha dakwahnya setahap demi setahap, di mulai dari daerahnya sendiri dengan cara mengajak masyarakat untuk mengisi masjid dan pergi keluar ke tempat-tempat lain untuk mengajak orang lain agar ikut untuk berdakwah menegakkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau resah dengan situasi umat saat itu, di mana umat Islam sudah tidak lagi mengindahkan keberadaan masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam dan masjid-masjid banyak kosong.

Dengan kerisauan tersebut, akhirnya usaha yang dibuat oleh Maulana Ilyas tadi dapat diterima oleh sebagian kalangan umat Islam sampai akhirnya gerakan dakwah ini berkembang bukan hanya di India, Bangladesh dan Pakistan, tetapi juga berkembang sampai ke berbagai penjuru dunia termasuklah ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, masuknya gerakan Jamaah Tabligh diperkirakan pada akhir tahun 1960an dan pada awal tahun 1970an yang ditandai dengan berdirinya markas di Jakarta.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Yusron (2008) memperkirakan bahwa masuknya Jamaah Tabligh ke Indonesia pada tahun 1952 melalui Malaysia dan Singapura dan kemudian baru mendirikan markas pada tahun 1970an. Di-

Gerakan Jamaah Tabligh pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Salafi yaitu gerakan dakwah yang mengajak manusia untuk mencapai tujuan hidup dengan mengikuti sunnah Nabi dan juga mengikuti perjuangan yang telah dilakukan oleh para sahabat dalam menyebarkan Islam dan mengajak manusia untuk taat kepada Allah.²⁶ Walaupun demikian, dalam beberapa cara berdakwah keduanya tidaklah sefaham antara satu sama lainnya, Salafi lebih menekankan aktivitas dilingkungan mereka sendiri, sedangkan Jamaah Tabligh menekankan kepada lingkungan di luar.

Pandangan Jamaah Tabligh dan Salafi Terhadap Khilafah

Jamaah Tabligh adalah gerakan yang sangat berhati-hati di dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Dalam ajaran Tabligh ada empat persoalan yang harus di jauhi oleh para jamaah baik ketika bergaul sehari-hari dengan masyarakat maupun ketika melakukan *khuruj fi sabilillah* untuk berdakwah di tempat lain baik itu selama tiga hari, empat puluh hari, empat bulan bahkan satu tahun.

Adapun keempat persoalan yang harus di jauhi oleh para Jamaah adalah *pertama*, ja-

kutip dalam Edi Amin, "Dakwah Rahmatan Lil-Alamin : Jamaah Tabligh di Kota Jambi", *Jurnal Komunikasi Islam*, 2012, Vol 2(01), hlm.37.

²⁶ Maulana Abdul Wahid adalah pengurus Pondok Pesantren Muqoddas yang merupakan pondok pesantren Jamaah Tabligh dan menjadi Markas atau tempat perkumpulan para Jamaah yang dahulunya biasanya berada di Masjid al-Azhar di Jelutung, Kota Jambi. Namun pada saat ini bangunan pesantren telah didirikan dan pusat Jamaah selain di Masjid al-Azhar juga dipusatkan di Pondok Pesantren ini yang terletak di Pal 12, Pondok Meja, Muaro Jambi (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2015, pukul 20.15-9.15)

maah dilarang untuk membicarakan hal-hal yang bersifat *khilafiyah*. Menurut Ustadz Abdul Wahid ketika para jamaah *khuruj*, maka apapun yang menjadi perdebatan *khilafiyah* di dalam masyarakat, maka jamaah tidak boleh untuk ikut campur dalam persoalan tersebut dan harus menghindari ketika pembicaraan tersebut muncul. *Kedua*, para jamaah diharuskan menghindari pembicaraan mengenai aib masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar para jamaah dapat menjaga lisannya dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Tujuannya agar jamaah tetap fokus melakukan dakwah dan tidak terpengaruh oleh pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia atau tidak berguna yang dapat merusak keimanan dan dakwah yang dijalankan. *Ketiga* adalah jamaah dilarang untuk membicarakan status sosial dalam masyarakat, pangkat dan jabatan serta dilarang untuk meminta sumbangan. *Keempat* menghindari pembicaraan mengenai politik. Para jamaah dilarang untuk membicarakan tentang politik terutama sekali membicarakan persoalan perbedaan pandangan mengenai bendera partai politik, ideologi ataupun membicarakan pemilihan calon-calon tertentu dalam pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah.²⁷

27 Wawancara dengan Maulana Abdul Wahid di Pondok Pesantren Muqoddash tanggal 22 Agustus 2015. Menurut Maulana Abdul Wahid lagi, tujuan Menghindari persoalan khilafiyah adalah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dari berbagai kelompok tanpa memandang perbedaan etnik, suku, ras, bahkan bendera politik. Selain itu, para jamaah juga dilarang untuk berdebat dengan para tokoh atau ustadz-ustadz yang berada di wilayah yang mereka kunjungi. Hal ini untuk menghindari selisih faham antara jamaah dengan masyarakat. Bahkan para jamaah dianjurkan untuk mendekati para ustadz ataupun para guru agama di wilayah yang mereka datang untuk menambah ilmu pengetahuan mereka seperti belajar fiqh dan sebagainya.

Walaupun adanya larangan untuk membicarakan persoalan politik, namun Jamaah Tabligh juga mempunyai sikap terhadap politik itu sendiri khususnya di dalam memandang sistem pemerintahan. Dalam konteks pendirian sistem pemerintahan Islam atau Khilafah misalnya, Jamaah Tabligh melihat bahwa usaha untuk membentuk sistem pemerintahan tersebut di zaman seperti ini merupakan sebuah perjuangan yang sangat berat. Hal ini karena sistem politik Islam tidak akan terbangun jika umatnya masih banyak yang melakukan perbuatan yang tidak baik dan jauh dari Allah sang pencipta, umat Islam masih mengikuti budaya-budaya dari luar Islam yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk membentuk sistem pemerintahan Islam harus dimulai dari tingkat bawah, di mulai dari diri sendiri, diperluas pada keluarga dan tetangga dan kemudian masyarakat luas. Oleh karena itu, apa yang dianjurkan oleh Jamaah Tabligh adalah membangun keimanan dan ketakwaan umat Islam terlebih dahulu, memperbaiki moral, akhlak dan yang paling penting memperbaiki ketauhidan umat.

Pembentukan politik Islam dapat tercapai jika ada persatuan umat, masjid misalnya adalah tempat terbaik untuk meningkatkan keimanan dan pembentuk persatuan umat, di mana pada zaman Rasulullah dan para sahabat, masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah untuk sholat semata, tetapi juga untuk tempat belajar dan mengajar dan khususnya tempat untuk menjalin silaturahmi sesama umat Islam. Namun pada saat ini, masjid sudah mulai ditinggalkan oleh umat Islam dan hanya sebagian umat Islam yang mau mengunjungi masjid khususnya untuk beribadah.

Menurut Jamaah Tabligh, sistem pemerintahan Islam itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada umat Islam. Namun

terbentuknya khilafah tersebut tidak akan terbentuk seketika tanpa adanya usaha-usaha untuk membentuk sistem pemerintahan tersebut. Salah satu usaha membentuk khilafah tersebut adalah memperbaiki umat Islam itu sendiri.²⁸

Pandangan Jamaah Tabligh terhadap sistem khilafah tidaklah jauh berbeda dari pandangan Salafi. Menurut Ustadz Hasbi, sistem pemerintahan Islam yang pernah dikenal adalah sistem Khilafah, namun perjuangan untuk membentuk sistem khilafah saat ini sepertinya mustahil jika harus dipaksakan tanpa memperbaiki umat, karena pemerintahan khilafah adalah anugerah Tuhan. Jika Allah memberikan karunia untuk terbentuknya sistem khilafah, maka akan terbentuklah. Namun menurut beliau bagaimana mungkin membentuk sistem khilafah jika umatnya saja jauh dari sang penciptanya. Sebuah sistem yang tidak mendapatkan ridho dari Tuhan, maka sudah pasti sistem politiknya juga tidak akan baik.²⁹

Salafi, sebagaimana pandangan Jamaah Tabligh, melihat bahwa yang harus diperjuangkan oleh gerakan dakwah Salafi adalah mendidik umat sehingga umat ini menjadi baik. Oleh itu, apa yang ditekankan oleh Salafi pertama sekali adalah memberikan pengajaran dan peningkatan ketauhidan pada umat, sehingga dapat membendung umat dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan membentengi umat Islam dari perkara-perkara yang buruk, terutama sekali perkara yang dapat

merusak ketauhidan mereka. Langkah ini adalah langkah utama yang harus dilakukan, karena mustahil terbentuk sebuah sistem politik yang baik apalagi sistem politik yang Islami apabila tidak disandarkan pada nilai-nilai keimanan. Sistem politik seperti ini hanya akan membawa kehancuran bagi umat dan bukannya membawa kebaikan. Namun apabila umat sudah baik, nilai-nilai ketauhidannya baik dan keimanannya juga baik, maka sistem politik khususnya khilafah akan terbentuk dengan sendirinya.³⁰

Dengan demikian, dalam memandang sistem khilafah antara Salafi dan Jamaah Tabligh tidak jauh berbeda. Sebagai umat Islam tentunya berharap akan terbentuknya sistem pemerintahan Islam yang pernah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad maupun para sahabat. Namun berbagi pandangan antara keduanya ini tidaklah sama ketika memahami demokrasi termasuklah ketika memandang partai politik yang menjadi elemen penting dalam sistem demokrasi walaupun partai politik tersebut adalah partai politik Islam yang menjadi wadah perjuangan sebagian umat Islam melalui saluran demokrasi.

Pandangan Jamaah Tabligh dan Salafi terhadap Demokrasi

Pandangan Jamaah Tabligh dan Salafi terhadap demokrasi dibagi pada pandangan terhadap partai politik khususnya partai politik Islam dan pemilihan umum. Ini karena elemen dalam demokrasi itu adalah kompetisi dan partisipasi.³¹ Partisipasi merujuk pada keikutsertaan masyarakat dalam politik salah satunya terlibat dalam pemilu, dan kompetisi

28 Wawancara dengan Ustadz Abdul Khairi 20 Agustus 2015 di Masjid Babul Jannah pukul 5.30-6.15. Ustadz Abdul Khoiri adalah salah satu ustadz yang aktif terlibat kegiatan Tabligh, sering memberikan bayan, taklim dan sebagainya baik di Markas mereka di Jelutong maupun di pondok pesantren Muqoddas. Beliau juga dipercayai menjadi imam masjid di Masjid Babul Jannah Rt. 30 Kenali Asam Bawah, Kota Jambi.

29 Wawancara dengan Ustadz Habsi tanggal 30 Agustus 2015 pada pukul 13.45-14.30

30 Wawancara dengan Ustadz Said tanggal 30 Agustus 2015 pada pukul 1.45-2.35

31 Penjelasan lanjut mengenai demokrasi ini lihat Dahl, R, *Polyarchy: Participation and Opposition*, (New Haven: Yale University Press, 1971).

merujuk kepada pemilihan umum sebagai pelanggaran kompetisi tersebut.

Dalam pandangan Jamaah Tabligh, ketentuan larangan berbicara mengenai politik merupakan bentuk perintah yang jelas untuk para jamaah. Dengan ketentuan ini tentunya para jamaah juga tidak akan ikut terlibat aktif dalam kegiatan politik termasuklah dalam partai politik Islam sekalipun. Namun dalam Jamaah Tabligh tidak ada ketentuan khusus untuk menolak sistem demokrasi.

Menurut Maulana Abdul Wahid, para jamaah yang sudah terlibat aktif dalam kegiatan Jamaah Tabligh, kecil kemungkinan untuk terlibat dalam aktivitas politik langsung baik itu partai politik nasionalis maupun partai politik Islam. Bagi Jamaah Tabligh, kehadiran partai politik Islam di tengah-tengah sistem politik yang demokrasi merupakan jalan yang ditempuh oleh sebagian umat Islam lainnya untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam itu sendiri.

“Apa yang diperjuangkan oleh sebagian umat Islam lainnya tentunya mempunyai dalil atau alasan sendiri yang kuat sehingga mereka berjuang melalui sistem politik atau melalui saluran politik yang benar. Namun Jamaah Tabligh tetap tidak akan terlibat dalam aktivitas partai politik tersebut karena tujuan Tabligh bukanlah berpolitik tetapi berusaha untuk membentuk keimanan dan persatuan umat.”³²

Dalam konteks pemilihan umum, setiap jamaah dilarang untuk membicarakan hal-hal yang bersifat khilafiyah dan menjauhi pembicaraan politik. Namun mereka tidak pernah memberikan masukan ataupun instruksi pada jamaah untuk memilih atau mendukung seseorang kandidat ataupun partai politik. Di samping itu juga, Jamaah Tabligh tidak melarang para jamaah untuk ikut dalam pemilu baik itu pemilu legislatif maupun eksekutif,

baik itu pada tingkat nasional maupun lokal.

Keterlibatan anggota Jamaah Tabligh ikut dalam pemilihan umum khususnya memberikan suaranya untuk mendukung partai tertentu atau calon-calon tertentu dalam pemilihan politik, maka dalam Jamaah Tabligh tidak ada sanksi yang diberikan kepada anggota. Karena itu merupakan hak individu jamaah tersebut dan bukan mewakili kepentingan jamaah secara keseluruhannya. Jamaah Tabligh juga tidak pernah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para anggota partai politik (Islam) ataupun mengadakan rapat untuk memberikan dukungannya. Tetapi yang terpenting menurut beliau adalah siapapun yang terpilih tetap harus menegakkan sunnah nabi.³³

Dengan demikian, Jamaah Tabligh memandang bahwa sistem demokrasi tersebut walaupun bukan datang dari Islam tidaklah menjadi satu persoalan penting yang harus diperdebatkan, karena yang terpenting adalah para pemimpin yang terpilih harus mampu menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Namun pandangan ini tidak sesuai bagi Salafi yang lebih memilih untuk tidak mendukung sistem politik seperti ini. Menurut Salafi, sistem politik Islam yang baik tidaklah seperti sistem politik yang ada sekarang khususnya sistem politik yang demokrasi, karena demokrasi banyak memiliki kekurangan.³⁴ Sistem poli-

³³ *Ibid.*

³⁴ Din (2014) telah mengidentifikasikan beberapa persoalan Salafi menolak sistem demokrasi yaitu, i) sistem politik yang *polytheism* dan pembentukan undang-undang berasal dari suara mayoritas bukan dari Tuhan, ii) terbentuknya kerjasama antara muslim dan non muslim untuk menentukan pemimpin walaupun dalam Islam muslim harus saling mendukung antara satu sama lain, iii) banyak dana yang diberikan untuk pemilu berasal dari negara Barat khususnya Kristen dan Yahudi, iv) terbukanya ruang kepada kaum non muslim untuk menuduh Islam sebagai agama yang tidak berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan

³² Wawancara dengan Maulana Abdul Wahid di Pondok Pesantren Muqoddash tanggal 22 Agustus 2015

tik ini akan menafikan suara-suara kelompok yang lebih sedikit jumlahnya atau minoritas. Mereka yang memiliki suara mayoritas akan menguasai sistem politik dan meminggirkan hak-hak orang lain. Suara mayoritas sulit sekali mempertimbangkan suara minoritas terutama sekali di dalam pengambilan keputusan walaupun suara minoritas itu memiliki kebenaran. Hal ini berbeda dengan sistem Islam yang memandang bahwa suara kebenaran tersebut harus dipertimbangkan dan diperjuangkan walaupun yang memberikan suara tersebut adalah kelompok minoritas.³⁵

Di samping itu, suara antara satu individu dengan individu lainnya tidak memiliki perbedaan khususnya di dalam pemilihan umum. Beliau mencontohkan untuk memilih seorang pemimpin seperti bupati, gubernur, presiden dan bahkan anggota legislatif sendiri tidaklah didasarkan kepada ketentuan Islam. Dalam Islam untuk memilih calon tertentu maka haruslah disandarkan pada orang-orang yang memiliki ilmu yang luas dan tentunya memiliki ilmu agama yang kuat, sehingga ketika memilih seorang pemimpin, maka orang-orang yang memiliki ilmu ataupun memiliki pengetahuan agama yang kuat ini mengetahui siapa yang layak untuk dijadikan pemimpin dan mana yang tidak, mereka mengetahui mana yang lebih banyak mudharatnya dan mana yang tidak. Namun pada masa ini tidaklah demikian, di mana antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu mempunyai nilai atau suara yang sama. Dengan demikian, apabila orang yang tidak berilmu tersebut membuat pilihan dengan suara terbanyak sedangkan orang yang berilmu memiliki suara yang sedikit, maka sudah tentu orang yang

dipilih juga salah karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai kriteria pemimpin yang baik. Oleh itu, kesalahan demokrasi adalah menyamaratakan suara antara orang yang memiliki ilmu dan tidak. Suara seorang yang bergelar professor yang telah menempuh pendidikan cukup panjang dari jenjang strata 1, 2 dan 3, ketika pada saat pemilu tidak memiliki arti yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang tidak sekolah sama sekali, bahkan yang tidak berilmu sama sekali. Artinya orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang luas akan memilih calon mereka sendiri atas dasar suka atau tidak suka yang mereka buat kriteria itu sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka yang terbatas.

Pandangan Salafi terhadap sistem politik dan demokrasi tentunya juga berpengaruh terhadap pandangan mereka pada partai politik Islam. Menurut Ustadz Hasbi, partai politik Islam saat ini tidaklah sesuai dengan ketentuan Islam, karena mengikuti dari sistem politik yang tidak Islami. Oleh itu, apabila sistem politik yang tidak islami diikuti maka sudah tentu partai politik Islamnya juga tidak sesuai dan jauh dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Ketentuan pemilihan pemimpin, misalnya pada era para sahabat, tidaklah menggunakan sistem kelompok-kelompok atau partai-partai politik seperti sekarang yang berbeda ideologi antara satu sama lainnya. Pada era sahabat, tabiin dan tabi' tabiin, ketika mereka akan memilih calon pemimpin, maka mereka mengedepankan ketentuan Allah dan rasulnya. Jika memilih pemimpin tentunya yang dilihat adalah kriteria kepemimpinan, ketaatan kepada Allah, kewibawaan dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Ketentuan yang telah diberikan oleh

masyarakat, v) terbangunnya politik uang, vi) pemilu memecah belah umat Islam.

35 Wawancara dengan ustadz Hasbi tanggal tanggal 30 Agustus 2015.

Allah SWT adalah ketentuan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dirubah ataupun ditambah-tambah. Begitu juga dengan partai politik Islam karena mereka hidup dalam sistem politik yang demokrasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, maka nilai perjuangan mereka juga tentunya tidak sesuai dengan agama karena mereka khususnya para politisi akan ikut arus yang ada dalam sistem politik tersebut.

Walaupun demikian, nilai-nilai yang ada di Salafi tidaklah serta merta meniadakan kepentingan politik. Menurut Ustadz Said, walaupun jamaah ataupun para anggota salafi tidak ikut dalam politik. Namun bukan berarti dakwah salafi mengharamkannya seratus persen, ada beberapa ketentuan yang membenarkan ataupun membolehkan keikutsertaan mereka dalam politik artinya ikut dalam pemilihan umum bukan ikut terlibat dalam aktivitas partai politik atau menjadi tim sukses dari calon-calon atau elit-elit politik tertentu dengan alasan persoalan mudharatnya.³⁶

Jika dalam sebuah pemilihan calon pemimpin dihadapkan pada dua pilihan dan satu pilihan lebih banyak mudharatnya, maka bisa saja ikut serta dalam pemilihan agar pemimpin yang baik tadi bisa memenangkan pemilihan tersebut karena dikhawatirkan pemimpin yang terkenal mudharatnya ini bisa menang dalam pemilihan. Artinya mengikuti pemilihan umum tersebut apabila bersifat darurat semata. Sebagai contoh persoalan kepemimpinan perempuan, karena dalam Islam yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki dan tidak dibenarkan laki-laki dipimpin oleh perempuan. Jika dihadapkan pada pemilihan seperti ini, misalnya dalam pemilihan presiden atau gubernur di mana yang satu calon adalah laki-laki dan satu calon adalah perem-

puan. Maka seandainya mereka tidak ikut dalam pemilihan tersebut, sudah pasti perempuan akan menang, maka sudah tentu umat Islam akan dipimpin oleh perempuan, maka sudah pasti kepemimpinan tersebut menyalahi aturan Islam, maka dibenarkan para anggota salafi untuk mengikuti pemilihan umum untuk memilih calon yang satunya lagi. Contohnya lagi jika ada beberapa calon pemimpin, maka dibenarkan para anggota untuk memilih calon yang memiliki mudharat yang lebih kecil jika dikhawatirkan pemimpin yang dipilih ini akan memberikan dampak yang buruk bukan hanya dari aspek-aspek umum seperti ekonomi, sosial atau kesejahteraan, tetapi juga jika dirasakan akan memberikan dampak buruk bagi umat Islam itu sendiri. Namun apabila memiliki mudharatnya sama, maka tidak diperlukan untuk mengikuti pemilihan umum.³⁷

Dalam konteks Indonesia misalnya, menurut Ustadz Said, bagi Salafi keikutsertaan dalam pemilihan umum atau menjatuhkan pilihan terhadap calon tertentu belum lah dirasakan penting karena sebagian besar orang Indonesia dihuni oleh umat Islam yang menyatakan diri mereka adalah pengikut ajaran Nabi dan hanya sebagian kecil yang mengikuti Syiah. Maka persoalan-persoalan umat ataupun pemimpin-pemimpin umat juga kebanyakan dari orang Islam, tentu hal ini tidaklah membahayakan umat Islam itu sendiri. Ini berbeda dengan persoalan politik di Yaman misalnya, di mana orang-orang Suria yang Sunni berhadapan dengan kaum Syiah yang memiliki penganut yang sama dan bahkan lebih, sehingga orang-orang Syiria dipimpin oleh orang Syiah, maka ketika ada calon Sunni berhadapan dengan Syiah maka dibenarkan ikut pemilihan untuk memilih pemimpin yang Sunni, walaupun sistem politik yang diguna-

36 Wawancara dengan Ustadz Hasbi dan Said tanggal 30 Agustus dan 7 September 2015.

37 Wawancara dengan Ustadz Said, tanggal 7 September 2015, pukul 13-14.30

kan itu tidak sesuai menurut Islam.³⁸

Walaupun adanya ketidaksetujuan mengikuti sistem politik di Indonesia, namun yang menjadi catatan adalah dalam konteks pemilihan presiden Indonesia 2014 lalu. Salafi tidaklah ikut dalam membuang suara dalam pemilihan umum legislatif pada tahun 2014 baik itu untuk memilih calon tertentu maupun partai politiknya. Namun yang menarik ketika pemilihan presiden tahun 2014 antara Prabowo Subianto dan Jokowi, di mana ada fatwa yang dikeluarkan untuk mendukung calon presiden tertentu. Meskipun adanya fatwa tersebut, namun menurut Ustadz Said keputusan itu tidaklah mutlak disandarkan kepada Salafi keseluruhannya, karena fatwa tersebut sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama Salafi, di mana ada juga yang tidak mengajurkan agar terlibat dalam sistem politik tersebut.

Alasan utama yang dikeluarkan oleh beberapa ulama Salafi tersebut untuk mengikuti pemilihan presiden dan memberikan dukungan pada calon tertentu, menurut ustadz Said, ini dikarenakan 'banyak orang-orang (disalah satu calon) yang cenderung kepada pemikiran syiah' sehingga beberapa ulama khawatir keberadaan tersebut dapat memperbesar kekuatan Syiah di Indonesia. Walaupun demikian, fatwa yang diberikan oleh beberapa ustadz tadi juga bukanlah instruksi yang harus diikuti karena itu merupakan ijtihad mereka.

Menurut beliau lagi, ijtihad yang diberikan oleh ulama salafi sendiri bukan hanya dalam konteks pemilihan presiden. Dalam dukungan partai politik misalnya juga pernah disuarakan oleh beberapa ulama salafi untuk memberikan dukungan pada salah satu partai politik Islam. Namun dukungan tersebut hanya masih berupa anjuran dan bukan per-

intah untuk mendukung karena sebagian yang lain juga tidak setuju untuk mendukung dan memilih partai politik tersebut.

Faktor lainnya yang menyebabkan mengapa salafi tidak mau ikut masuk ke dalam sistem politik adalah dikhawatirkan ketika orang ingin masuk ke dalam sistem tersebut dengan niat untuk merubah sistem dari dalam, tetapi setelah masuk ternyata arus di dalam sistem tersebut lebih kuat, maka ditakutkan akan merusak anggota Salafi itu sendiri. Oleh itu, langkah terbaik adalah memperbaiki keadaan disekitar terlebih dahulu dan kemudian setahap demi setahap ke lingkungan yang lebih luas. Jika persoalan umat sudah selesai, maka dengan sendirinya Allah akan menganugerahi sistem pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Pandangan Jamaah Tabligh dan Salafi Terhadap Monarki

Dalam memandang sistem pemerintahan monarki, Jamaah Tabligh juga tidaklah mempermasalahkan sistem pemerintahan sebagaimana yang dipraktikkan oleh beberapa negara Islam seperti Brunnei Darussalam dan Arab Saudi. Artinya dalam sistem politik bagaimanapun, Jamaah Tabligh tetap menerima situasi politik tersebut, karena perjuangan yang dilakukan bukan merubah pemerintah dengan kekuatan politik, tetapi memperbaiki sistem politik melalui perbaikan umat Islam itu sendiri.

Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Salafi, dalam memandang sistem pemerintahan yang monarki seperti yang dipraktikkan oleh beberapa negara Islam misalnya Arab Saudi. Salafi melihat bahwa sistem pemerintahan monarki ataupun berbentuk kerjaaan tidaklah bertentangan dengan Islam, karena sistem pemerintahan ini pernah dip-

³⁸ *Ibid.*

raktikkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, tabi'in dan tabi' tabi'in, sehingga jika ada negara Islam yang mempraktikkan sistem seperti ini pada masa sekarang maka ia dapat diterima dan tidak menjadi satu masalah menurut hukum Islam.

Jika dilihat dalam konteks sejarah pemerintahan Islam, sistem monarki pertama sekali dipraktikkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang mulai memerintah sejak tahun 661 Masehi. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, umat Islam saat itu mengangkat Hasan bin Ali untuk menjadi khalifah. Namun konflik antara umat Islam yang saat itu sepertinya sulit untuk diselesaikan, akhirnya Hasan bin Ali lebih memilih melepaskan jabatannya ke Muawiyah yang dianggapnya sebagai solusi terbaik menyelesaikan persoalan politik yang melanda umat Islam selepas kematian Khalifah Ali. Sejak saat itu, Muawiyah mulai memberlakukan sistem pemerintahan monarki. Menjelang akhir kekuasaannya Muawiyah kemudian menunjukan anaknya Yazid menjadi Khalifah berikutnya dan begitu juga dengan Yazid yang digantikan oleh anaknya.

Selama memerintah Muawiyah terkenal dengan pemimpin yang baik dan mampu mempersatukan umat Islam. Pada masa ini juga beliau berhasil memperluas wilayah kekuasaan umat Islam walaupun memerintah tidak sampai satu dekade. Keberhasilan beliau dengan sistem monarki ini menunjukkan bahwa sistem politik apapun jika dipimpin oleh orang-orang yang baik maka akan membentuk sebuah pemerintahan yang baik pula. Namun keberhasilan Muawiyah menyatukan umat Islam ternyata tidak diikuti pada zaman anaknya memerintah, di mana banyak sekali pergolakan politik dengan umat Islam termasuklah pada peristiwa Karbala yang mengakibatkan terbunuhnya cucu Ali bin Abi Thalib.³⁹

39 Muawiyah dianggap sebagai salah seorang saha-

Penutup

Salafi dan Jamaah Tabligh adalah dua gerakan agama Islam yang mempunyai tujuan yang sama yaitu memperbaiki ketauhidan umat Islam dan memilih jalur dakwah sebagai jalan perjuangan mereka. Namun sisi yang sama tersebut ada banyak perbedaan antara keduanya, salah satunya adalah ketika memandang sistem pemerintahan. Dalam memandang sistem pemerintahan Khilafah, keduanya tidak ada perbedaan dan menganggap bahwa sistem tersebut adalah karunia Tuhan, namun memandang sistem pemerintahan demokrasi dan monarki terdapat perbedaan antara keduanya.

Jamaah Tabligh lebih memilih untuk pragmatis dan menyesuaikan diri dari segala situasi politik. Sikap ini dibangun dengan cara tidak memberikan larangan secara tegas kepada para jamaah untuk tidak ikut terlibat dalam sistem apapun baik itu monarki maupun demokrasi termasuklah dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan Salafi yang tegas melarang anggotanya untuk terlibat dalam sistem politik khususnya ikut dalam mensukseskan demokrasi, karena sistem ini dianggap

bat Nabi Muhammad SAW, di mana beliau hidup di zaman Nabi dan empat Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali). Muawiyah lahir pada tahun 600 M, kurang lebih ketika Usia Nabi Muhammad 30 tahun. Beliau kemudian mengangkat anaknya menjadi Khalifah, pada masa Yazid ini umat Islam terjadi perpecahan, Husein, anaknya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh anak buah Abdullah bin Zubair. Setelah terbunuhnya Husein, konflik semakin membesar dengan penduduk Madinah khususnya sehingga akhirnya Yazid mengirim pasukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tetapi pembunuhan dan penodaan terjadi di Madinah. Ketika Yazid meninggal dunia persoalan Madinah belum terselesaikan. Kekhalifaan saat itu digantikan oleh anaknya yang bernama Muawiyah bin Yazid yang memerintah hanya kurang lebih 6 bulan.

memiliki banyak kelemahan dan bukan yang datang dari Islam. Ketika orang-orang Islam yang berjuang melalui saluran politik ini termasuklah melalui partai politik Islam, maka sudah pasti perjuangan tersebut melanggar ketentuan Islam. Namun sikap tegas ini akan berubah jika situasi politik tidak menguntungkan umat Islam. Pandangan ini berbeda ketika melihat sistem pemerintahan monarki, sistem ini masih dapat diterima, karena pernah dipraktikkan pada masa sahabat dan generasi berikutnya.

Dengan demikian, perbedaan yang menonjol dari kedua gerakan Islam ini terletak pada politik dakwah mereka, di mana Jamaah Tabligh lebih cenderung untuk beradaptasi, sedangkan Salafi cenderung untuk melihat situasi.

Bibliography

- Abdul Qadir Jawaz, Buku Mulia Manhaj Salaf, Bogor : Pustaka At-Taqwa, 2008
- Arif Rahmanul Hakim, "Pandangan Salafi Raudhlatul Amin Desa Ketapang Jaya Terhadap Pemilihan Umum di Kabupaten Sampang", *Jurnal Review Politik*, 2014, 04(1): 1-29.
- Dahl, R, *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press, 1971.
- Din Wahid, *Nurturing The Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens In Contemporary Indonesia*, Disertasi Universitas Utrecht, 2014a
- Din Wahid, "Pentas Jihad Gerakan Salafi Radikal Indonesia" book review, *Studia Islamika*, 2007, Vol.14(02): 341-362.
- Din Wahid, "The Challenge of Democracy in Indonesia: The Case Salafi Movement", *Islamika Indonesianna*, 2014b, 1(1): 59-74.
- Farish A Noor, *Islam on the Move: the Tablighi Jama'at in Southeast Asia*, Amsterdam: Amsterdam University Pers, 2012.
- Haris Mahdi, "Interaksi Sosial Jamaah Tabligh di Kota Malang: Studi Tentang Interaksi Sosial Jamaah Tabligh di Masjid Pelma dan Ponpes Jami'urrahma Malang, *El-QUDWAH*, 2012 atau dapat dilihat di <http://www.moraref.or.id/record/view/26594>).
- Jan A. Ali, "Tabligh Jam'at: A transnational movement of Islamic faith regeneration", *European Journal of Economic and Political Studies*, 2010.
- Muhammad Ali C, "Strategi Dakwah Salafi di Indonesia", *Jurnal Dakwah*, 2013, XIV(1): 1-25.
- Roswati Nurdin, "Perspektif Salafi dan Jamaah Tabligh terhadap Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW (Studi Kasus di Desa Batu Merah Ambon)", *Jurnal Fikratuna*, 2015, 7(1): 198-211.
- Rusli, "Indonesian Salafism and Jihad and Suicide Bombing", *Journal of Indonesian Islam*, 2014, 8(01): 93.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Wiktorowicz, Q, "Anatomy of Salafi Movement", *Studies in Conflict & Terrorism*, 2006, hlm. 207.
- Yusron, 2008 dalam, Edi Amin, "Dakwah Rahmatan Lil- Alamin : Jamaah Tabligh di Kota Jambi", *Jurnal Komunikasi Islam*, 2012, 2(01).
- Zainal Arifin, "Kepemimpinan Kiai Dalam Ideologisasi Pemikiran Santri Di Pesantren-Pesantren Salafiyah Mlangi Yogyakarta" Inferensi, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2015, Vol. 9(2).